

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keluarga memiliki peranan penting dalam mendukung program pemerintah terutama dalam pengendalian pertumbuhan penduduk karena salah satu ujung tombak suksesnya program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat di tentukan oleh keluarga terutama suami istri dalam mengambil keputusan untuk merencanakan jumlah anak yang diinginkan dan berapa lama jarak usia antar anak yang akan di lahirkan, dan juga bagaimana keluarga merencanakan jumlah anak yang diinginkan akan menjadi penting dalam mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera dan pengendalian jumlah penduduk suatu wilayah. (Hendro Ekwarso, 2010:2)

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang berada di Asia Tenggara. Dengan luas wilayah yang besar dan sumber daya yang berlimpah, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang disegani di mata dunia. Sebagai negara yang berkembang tentunya jumlah penduduk di Indonesia tidaklah sedikit. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa, dan mencapai 254.989.908 jiwa pada tahun 2015 (www.bps.go.id).

Indonesia menempati peringkat ke-3 penduduk terbanyak di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia sangatlah tinggi dan tidak terkendali. Jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan lahan yang ada



tentunya akan sangat miris jika angka pertumbuhan penduduk tersebut semakin bertambah terus-menerus.

Ledakan jumlah penduduk tanpa dikendalikan dari aspek lainnya akan mengakibatkan banyak hal yang berdampak negatif, salah satunya yaitu terjadinya perebutan lahan untuk perumahan dan pertanian, sulitnya ketersediaan pangan, semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah tangga ataupun pabrik, angka pengangguran, kriminalitas dan kemiskinan yang meningkat, angka kesehatan maupun kecukupan gizi masyarakat menurun, dan banyak lagi yang lainnya.

Jika melihat jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus menerus dibiarkan seperti ini, maka ketidakseimbangan akan terus menerus menghantui Indonesia. Tentu merupakan angka yang sangat fantastis jika angka pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak segera ditekan dan ditanggulangi sebagaimana mestinya. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah yang akan berpengaruh pada dampak sosial dan dampak ekonomi. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Dari situlah muncul program KB yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk yaitu, menggalakkan program Keluarga Berencana untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan massal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat, kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah (PP) Nomor 87 tahun 2014 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tujuan Keluarga Berencana.

Guna mewujudkan amanah dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tersebut diperlukan kesamaan pandangan dan persepsi pada Dinas/Badan/Instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau serta seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Riau, sehingga diperlukan sosialisasi tentang Program Keluarga Berencana. Sementara itu, untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) maka diperlukan perluasan jaringan dengan mitra kerja, baik dari pihak pemerintah maupun swasta serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memadai.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari provinsi Riau, bekerjasama dengan instansi yang mengurus tentang Keluarga Berencana di setiap Kabupaten. Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang sedang fokus mengimplementasikan program dari BKKBN tersebut. Selain bekerjasama dengan BKKBN, Badan Keluarga Berencana dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Rokan Hulu juga mempunyai tugas pokok yang sinkronisasi yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun jenis KB yang di lakukan di Kabupaten Rokan Hulu adalah seperti IUD (Intra Uterine Devices), MOP (Metode Operatif Pria), MOW (Metode Operatif Wanita), Suntik, Pil dan Kondom. Dan yang menjadi target peserta ialah PUS.

Alasan program BKBPP dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu perlu ditingkatkan lagi karena masih ditemukannya beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Jumlah pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yang menerangkan tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin :

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009-2014

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pria	229.653	245.636	266.677	267.725	281.915	294.279
Wanita	219.801	229.375	249.047	249.852	261.942	273.847
Total	449.454	475.001	515.724	517.577	543.857	568.576

Sumber : Kantor BKBPP Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dan ini menyebabkan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan di kabupaten Rokan Hulu semakin sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Sehingga menyebabkan mulai timbul pengangguran-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan dari sumber lain.

b. Pengangguran.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu terbilang tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada.

Hal ini dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut :

Tabel I.2 : Persentase Kepala Keluarga Tidak Bekerja Di Kab. Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepala Keluarga Yang Tidak Bekerja	Persentase (%)
1	Rambah	8794	465	5,28
2	Rokan IV Koto	5449	690	12,66
3	Ujung Batu	9995	166	1,66
4	Kunto Darussalam	7592	308	4,05
5	Kepenuhan	4964	181	3,64
6	Tambusai	8683	471	5,42
7	Tambusai Utara	13746	662	4,2
8	Kabun	3133	643	20,5
9	Tandun	5844	370	6,33
10	Rambah Hilir	8555	543	6,34
11	Rambah Samo	6720	328	4,88
12	Bangun Purba	3765	96	2,54
13	Pagaran Tapah	4378	160	3,65
14	Bonai Darussalam	6595	251	3,8
15	Kepenuhan Hulu	3055	60	1,96
16	Pandalian IV Koto	2907	475	16,3
Total		106.175	5.869	5,52

Sumber : Kantor BKBPP Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah kepala keluarga tidak bekerja di kabupaten Rokan Hulu yaitu 5.869 atau 5,52% dari jumlah keluarga yang ada. Dari sudut pandang ekonomi, keluarga yang tidak bekerja akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi kondisi ketahanan keluarga yang di pimpinnya, terutama untuk keluarga dimana kebutuhan hidupnya masih cukup besar.

c. Banyaknya keluarga Pra-Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Ketika banyaknya keluarga Pra-Sejahtera di suatu daerah, maka daerah tersebut akan sulit untuk maju dan beraktivitas normal. Berikut jumlah keluarga pra-sejahtera :

Tabel I.3 : Persentase Keluarga Pra-Sejahtera Di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah keluarga pra-sejahtera	Persentase (%)
1	Rambah	8794	965	10,97
2	Rokan IV Koto	5449	588	10,97
3	Ujung Batu	9995	731	7,31
4	Kunto Darussalam	7592	816	10,74
5	Kepenuhan	4964	512	6,28
6	Tambusai	8683	1221	14,06
7	Tambusai Utara	15746	1379	8,75
8	Kabun	3133	387	12,35
9	Tandun	5844	634	10,84
10	Rambah Hilir	8555	890	10,4
11	Rambah Samo	6720	1056	15,71
12	Bangun Purba	3765	1237	32,85
13	Pagaran Tapah	4378	394	8,99
14	Bonai Darussalam	6569	865	13,11
15	Kepenuhan Hulu	3055	246	8,05
16	Pendalian IV Koto	2907	82	2,82
Total		106.175	11.803	11,11

Sumber : Kantor BKBPP Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel di atas dapat di lihat persentase jumlah keluarga di Kabupaten Rokan Hulu 11,11% diantaranya merupakan keluarga Pra-Sejahtera. Ini

merupakan proporsi yang cukup besar dan mengindikasikan tidak begitu tingginya tingkat kesejahteraan keluarga. Apabila dilihat dari setiap kecamatan terlihat sekali perbedaan antar kecamatan untuk proporsi keluarga Pra Sejahtera.

d. Kriminalitas

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan potensi daerah akan mengacu kepada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kemudian kedua hal tersebut akan melahirkan kriminalitas. Hal ini akan terjadi apabila masyarakatnya kurang akan pengetahuan dan pendidikan, sebagaimana Jumlah Tindak Pidana (JTP) di Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

Tabel. I.4 : Jumlah Tindak Pidana (JTP) Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016

NO	KESATUAN	TAHUN 2016		%
		JTP	PTP	
1.	Sat. Reskrim	128	104	81,25
2.	Rambah	36	25	69,44
3.	Ujung Batu	64	48	75
4.	Kunto Darussalam	98	67	68,38
5.	Tambusai	109	70	64,22
6.	Kepenuhuan	119	82	68,91
7.	Rokan Iv Koto	111	79	71,17
8.	Tandun	91	58	63,74
9.	Kabun	43	35	81,39
10.	Tambusai Utara	29	24	82,76
11.	Rambah Samo	42	31	73,81
12.	Rambah Hilir	59	43	72,88
13.	Bonai Darussalam	46	31	67,39
Jumlah		975	697	71,49

Sumber : www.detikperistiwa.com

Dari tabel diatas dapat diketahui data akhir tahun 2016 terkait Jumlah Tindak Pidana (JTP) di lingkungan Polres Rokan Hulu serta jumlah penyelesaian TP, di dominasi kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) 136 kasus dan

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 58 kasus, Jumlah Tindak Pidana 975 kasus, jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) 697 dengan persentase 71,49 %, dengan rincian curat 136 kasus, curanmor 58 kasus, penganiayaan berat (Anirat) 6 kasus, pencurian dengan kekerasan 41 kasus, perkosaan 3 kasus, pembunuhan 5 kasus, uang palsu 1 kasus, penipuan 44 kasus serta kebakaran lahan dan hutan 3 kasus.

Jumlah Tindak Pidana ini meningkat dari tahun 2015 yang Jumlah Tindak Pidananya 848 kasus, kasus curat menempati posisi tertinggi 148 kasus, penipuan 37 kasus, pencurian sepeda motor 52 kasus, pencurian dengan kekerasan atau perampokan 26 kasus, pemerkosaan 4 kasus, kebakaran hutan dan lahan 3 perkara dan pembunuhan 2 kasus. Kemudian peredaran dan penyalahgunaan Narkoba sebanyak 75 kasus. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebanyak 812 kasus, Jumlah Tindak Pidana bertambah sebanyak 36 kasus.

Berdasarkan permasalahan dan dampak yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKBPP) DALAM MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah Implementasi Program Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Rokan Hulu?

TUJUAN PENULISAN

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Program Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. MANFAAT PENULISAN

- a. Sebagai penambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama di lain kesempatan.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi terkait yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Rokan Hulu mengenai pelaksanaan program dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini di bagi atas enam pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab terdapat sub-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka dari penulisan skripsi ini, yang antara lain berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi penulisan, pandangan islam tentang konsep penelitian, kerangka berfikir, konsep operasional dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu, gambaran umum sejarah Organisasi, struktur organisasi, jumlah pegawai, visi misi dan tujuan hingga uraian tugas pegawai pada BKBPP di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian, bab evaluasi terhadap hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang di peroleh dari bab-bab sebelumnya.

